

## Indikator dan Kriteria Sosial Budaya untuk Penilaian (PHPL)

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kriteria 4: Sosial dan Budaya</b>						
4.1	Luas dan batas yang jelas antara kawasan unit manajemen IUPHHK pada hutan alam dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan para pihak yang terkait	Delineasi disini bukan hanya diartikan sebagai suatu kegiatan teknis membuat 'garis batas' antara kawasan konsesi dengan kawasan lainnya. Jika kawasan konsesi berhimpitan dengan komunitas masyarakat adat deliniasi berarti pula kegiatan mem-uat "garis batas" antara kawasan yang tunduk pada hukum negara dan kawasan yang tunduk pada hukum adat setempat. Tidak dilakukannya proses delineasi, atau delineasi yang dilakukan secara sepihak saja tanpa melibatkan komunitas setempat, dapat berakibat terja-dinya pertentangan/klaim antara unit manajemen IUPHHK pada hutan alam dengan komuni-tas setempat atas areal yang sama. Sebaliknya delineasi yang dilakukan secara bersama (tenurial Security) dari kedua belah pihak.	Pihak yang lahannya berbatasan dengan kawasan konsesi (masyarakat adat, pendatang atau perusahaan lain).	Survey/observasi tapal-tapal batas lapangan.	5	Sangat Baik - Tidak ada konflik - Kejelasan batas - Proses secara partisipatif - Terdapat pendokumentasian data tentang luas dan batas konsesi antara UM dengan masyarakat
			Keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan batas lahan konsesi.	Studi dokumen		
			Kegiatan teknis membuat garis batas antara kawasan konsesi dengan kawasan lainnya.	Overlay rekonstruksi peta/kawasan konsesi		
			Bentuk penyesuaian antara hukum negara dan hukum adat yang disepakati ketika Membuat garis batas.	Wawancara dengan pihak terkait		
			Proses membuat batas lokasi. - proses peletakkan tanda batas. - adanya pihak ketiga sebagai saksi.		4	Baik - Proses penetapan batas UM dengan kawasan adat dilaksanakan secara partisipatif - Ada keluhan, tetapi terdapat mekanisme penyelesaian.
			Ada tidaknya kesepakatan antara pemegang hak konsesi dengan masyarakat sekitar untuk keperluan hidupmasyarakat setempat		3	Sedang - Kejelasan batas dan luas kawasan UM dengan kawasan hukum adat - Tersedianya data ketergantungan masyarakat terhadap hutan - Ada keluhan, tetapi tidak ada mekanisme

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah orang yang tergantung pada hutan		2	penyelesaian Buruk - Batas antara UM dengan kawasan hukum adat belum jelas - Terdapat konflik antara UM dengan masyarakat adat. - Terdapat konflik antara UM dengan masyarakat adat.
			Bentuk-bentuk pertentangan antara unit manajemen dengan masyarakat sekitar.		1	Sangat Buruk - Batas antara UM dengan kawasan hukum adat belum jelas - Terdapat sengketa antara UM dengan masyarakat adat
			Intensitas pertentangan			
			Cara mengelola pertentangan			
			Ada tidaknya perambahan atau klaim wilayah oleh masyarakat adat			
			Pendokumentasian: (proses-proses kesepakatan batas, penetapan tanda batas, daa luas lahan untuk kegiatan subsistem, jumlah orang yang terampung, besaran nilai ekonomi atas akses masyarakat ke hutan, peta perambahan hutan).			
4.2	Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan	Pertentangan klaim atas hutan yang sama dapat saja terjadi akibat pemberian kawasan konsesi pada pemegang	Cara-cara penyelesaian sengketa	Survey	5	Baik Sekali - Terdapat pengakuan tertulis dari UM

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama	IUPHHK pada hutan alam dari pemerintah ter-letak diatas tanah dan hutan yang telah dimuati hak-hak komunitas. Pertentangan klaim ini sebenarnya berasal dari sumber hukum yang berbeda, klaim pemegang IUPHHK pada hutan alam berasal dari hukum negara yang bersifat sentral, tertulis, dan ditegakkan oleh suatu birokrasi hukum, sedangkan klaim komunitas berasal dari sumber hukum adat yang beragam, tidak tertulis, dan ditegakkan melalui kepatuhan anggota masyarakat hukum dan ke-lembagaan adat. Ketika bersengketa, unit PHPL haruslah menyadari bahwa ia sebagai pendatang baru telah memasuki wilayah yang telah 'bertuan' dan upaya penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak mendiskriminasi (apalagi mengundang represi atau merepresi secara langsung) akses mereka terhadap penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan mereka.				<p>terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat ada perjanjian tertulis menyangkut kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</li> <li>- Tidak ada keluhan sama sekali menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, na-mun UM memiliki mekanisme untuk penyelesaiannya</li> </ul>
		Pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memiliki kapasi-tas dan kompetensi mengelola sengketa secara tepat (appropriate dispute management) yang menghargai kedudukan komunitas sejajar dengan unit PHPL. Misalkan, ketika Unit PHPL menginginkan masyarakat melepaskan hak tenurialnya atas kawasan tertentu, maka Unit PHPL harus memperoleh persetujuan yang disadari oleh ke-seluruhan komunitas yang akan terpengaruh oleh perubahan itu (Informed Consent) dan dilaksanakan secara terbuka melalui perjanjian-	Ukuran rasa keadilan	Wawancara/FGD	4	<p>Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengakuan tertulis dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.</li> <li>- Terdapat perjanjian tertulis menyangkut kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan</li> </ul>

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
		perjanjian prosedur yang tepat.				<p>masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun UM memiliki mekanisme untuk penyelesaiannya</li> </ul>
			Derajat perubahan intensitas sengketa	Pengecekan perjanjian di institusi setempat	3	<p>Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengakuan dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.</li> <li>- Terdapat ada perjanjian kesetaraan pegeoaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</li> <li>- Ada keluhan meyangku hak kesetaaan masyarakat hu-um adat dan atau masyarakat setempat.</li> </ul>
			Bentuk-bentuk penghargaan pemegang ILP-HH terhadap komunitas berkenaan dengan pengelolaan bersama	Data dapat diperoleh dari unit pengelolaan	2	<p>Buruk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pengakuan dari UM terhadap hak masyarakat hukum adat dan atau masyaakat setempat</li> </ul>

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
						<p>dalam pengelolaan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada perjanjian kesetaraan pengelolaan bersama UM dengan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat</li> <li>- Ada konflik akibat tidak diakuinya hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat</li> </ul>
			Prosedur membuat perjanjian Jenis atau obyek dan jumlah perjanjian yang melibatkan UM dengan masyarakat setempat		1	<p>Sangat Buruk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada upaya apapun dari UM untuk mengakui kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.</li> <li>- Ada Sengketa antara UM dan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dim skala yang besar.</li> </ul>
			Kounitas lokal yang terlibat dalam perjanjian antara UM dengan Masyarakat setempat			
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif, serta pembagian biaya dan manfaat	Di dalam hutan terkan-dung pula Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lain, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Pemegang IUPHHK pada hutan alam hanya memperoleh hak pemanfaatan (use right) kayu. Tidak ada satu hak Unit manajemen IUPHHK pada	Jenis dan bentuk bentuk HHBK	Survey	5	<p>Sangat Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak</li> <li>- Terdapatnya jaminan distribusi manfaat</li> </ul>

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
	yang adil antara para pihak.	hutan alam untuk membatasi komunitas memanfaatkan Hasil Hutan Kayu (HHK) secara terbatas untuk pemenuhan kebutuhan pa-pan dan memanfaatkan HHNK se-penuhnya. Namun, Unit Manajemen IUPHHK pada hutan alam tidak dapat mengelakkan diri dari terjadinya kerusakan akibat penebangan kayu, yang berakibat hilang atau menurunnya akses komunitas untuk memanfaatkan hasil hutan. Bagi komunitas setempat, akses pemanfaatan hasil hutan merupakan sandaran bagi mereka untuk melanjutkan bukan hanya kehidupan ge-nerasinya saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.				<p>pada para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya keluhan dalam distribusi manfaat dari para pihak.</li> </ul>
			Bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan(secara terbatas) oleh masyarakat	Wawancara/FGD tokoh masyarakat.	4	<p>Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak</li> <li>- Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi.</li> <li>- Adanya keluhan dalam distribusi manfaat, tetapi terdapat mekanisme penyelesaian.</li> </ul>
			Kesepakatan-kesepakatan pemanfaatan HHK (dan HHBK) yang dibuat antara pemegang IUPHHK dengan masyarakat sekitar	Pengecekan dokumen ketenagakerjaan di unit pengelolaan	3	<p>Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak.</li> <li>- Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak</li> <li>- Adanya keluhan</li> </ul>

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
						dalam distribusi manfaat.
			Mekanisme dalam unit manajemen untuk distribusi insentif		2	Buruk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak</li> <li>- Distribusi manfaat tidak adil pada para pihak</li> <li>- Adanya konflik dalam distribusi manfaat.</li> </ul>
			Pola distribusi insentif		1	Sangat Buruk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak</li> <li>- Distribusi manfaat tidak adil pada para pihak</li> <li>- Adanya sengketa dalam distribusi manfaat</li> </ul>
			Proses penentuan distribusi insentif			
			Perubahan pola akses komunitas untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan			
			Penyebab perubahan pola akses komunitas untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan			
			Akibat perubahan pola akses komunitas untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan terhadap hubungan antara pemegang IUPHHK dengan warga komunitas			

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Perencanaan dan implementasi pemanfaatan hutan telah mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.	Jauh sebelum adanya perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan alam, masyarakat adat telah memiliki akses dan kontrol secara penuh atas kawasan adatnya, termasuk hutan didalamnya. Kehadiran pemegang IUPHHK pada hutan alam sudah selayaknya menghormati hak-hak yang bersifat lintas generasi ini (hak asal usul). Tidak boleh terjadi, adanya pengambilan kawasan adat dan tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat adat untuk memanfaatkan hutan bagi pemenuhan hidup sehari-hari kekayaan di atasnya tanpa persetujuan masyarakat adat. Wujud penghormatan pemegang IUPHHK pada hutan alam terhadap hak asal usul ini adalah dipenuhinya azas persetujuan yang disadari (azas informed consent) oleh komunitas yang terpengaruh oleh kehadiran Unit PHPL ini melalui proses pembuktian terbaik dimana harus diperoleh bukti bahwa wilayah masyarakat adat bebas dari klaim Pemegang IUPHHK pada hutan alam.	Buku perencanaan hutan	Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi	5	Baik Sekali - Perencanaan dan implementasi seluruh hal yang terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat dilaksanakan secara partisipatif
			Bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	Survey lapangan	4	Baik - Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat - Sebagian besar hal yang ada dalam dokumen perencanaan yang terkait dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat direalisasikan oleh

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
						UM.
			Bentuk dan atau dokumen persetujuan masya adat dalam pengambilan KH oleh IUPHHK	Wawancara dengan tokoh masyarakat	3	Sedang - Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat - Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh UM.
			Bentuk pengaruh kehadiran PHPL terhadap komunitas		2	Buruk - Adanya dokumen perencanaan yang disusun secara sepihak oleh UM. - Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh UM.
			Ada tidaknya klaim IUPHHK terhadap wilayah masyarakat adat		1	Sangat Buruk - Kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat diabaikan dalam dokumen perencanaan
			Pada tingkat mana pengakuan hak-hak adat tersebut diakui			
4.5	Peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas	Kegiatan IUPHHK pada hutan alam secara langsung membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Idealnya kesempatan kerja dan peluang berusaha itu dapat dimanfaatkan terutama sekali oleh tenaga kerja yang berasal dari	Bidang pekerjaan yang berisi oleh warga setempat	Cek laporan ketenagakerjaan unit pengelolaan.	5	Sangat Baik - Semua kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan diprioritaskan bagi

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
	ekonominya berbasis hutan.	komunitas-komunitas yang bersangkutan. Ada kalanya warga komunitas tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang usaha yang terbuka, baik akibat kebijakan Pemegang IUPHHK pada hutan alam maupun keterbatasan kemampuan pihak warga komunitas itu sendiri. Kegiatan IUPHHK pada hutan alam wajib memfasilitasi warga komunitas agar mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha itu, baik dengan kebijakan-kebijakan tenaga kerja yang tidak diskriminatif maupun melalui penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan warga komunitas itu.				masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.
			Besaran tenaga kerja yang terserap; relatif terhadap jumlah tenaga kerja keseluruhan	Cek data dikantor pemerintah setempat	4	Baik - Semua kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan diberikan bagi masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.
			Konteks munculnya peluang berusaha di dalam atau di sekitar pemegang IUPHHK	Survey demografi	3	Sedang - Terdapat kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat.
			Besaran peluang kerja	Survey RT hasil hutan non kayu	2	Buruk - Terdapat kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat, namun sangat terbatas
			Kebijakan penerimaan tenaga		1	Buruk Sekali

No	Kriteria dan Indikator	Pengertian	Verifier	Metode Verifikasi	Bobot Penilaian	
					Nilai	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
			kerja oleh IUPHHK			- Tidak terdapat kesempatan kerja, berusaha dan pelatihan bagi masyarakat setempat
			Kebijakan/upaya pemegang IUPHHK untuk meningkatkan kemampuan warga agar dapat merebut kesempatan kerja di perusahaan.			
			Fasilitas (pelatihan atau magang) yang diberikan oleh pemegang IUPHHK terhadap warga setempat agar kemampuan kerjanya meningkat			
			Kebijakan tenaga kerja yang transparan			
			Tersedianya kesempatan pelatihan bagi masyarakat setempat			

Disusun kembali oleh Burhanuddin Gala, Antropologi, Sosial Budaya